



# PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

Jl. RTA MILONO No. 09 TELP : (0536) 3221853-3221854 FAX : (0536) 3221854

Website : [www.pt-palangkaraya.go.id](http://www.pt-palangkaraya.go.id) E-mail : [ptkalteng@yahoo.com](mailto:ptkalteng@yahoo.com)

**PALANGKA RAYA**

Palangka Raya, 30 Januari 2018

Nomor : W16-U/ **195** /PL.07 /II/2018  
Lampiran : 2 (dua) lembar  
Perihal : Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan  
Revaluasi BMN

K e p a d a Yth. :

1. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya
  2. Para Sekretaris Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah
  3. Para Sekretaris Pengadilan Agama se-Kalimantan Tengah
  4. Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
- di -

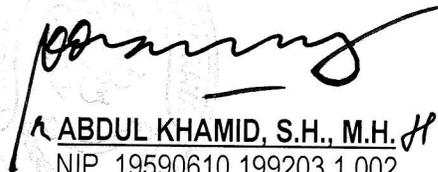
T e m p a t

Sehubungan dengan surat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 20/BUA.4/PL.07/1/2018 tanggal 11 Januari 2018 perihal Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Revaluasi BMN, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mewajibkan kepada semua satuan kerja dibawah Koordinator wilayah untuk membuat Nota Kesepakatan Verifikasi dan Validasi hasil pelaksanaan Revaluasi BMN;
2. Nota Kesepakatan yang dibuat harus melampirkan format isian Verifikasi dan Validasi terhadap nilai hasil Revaluasi BMN dan nilai koreksi yang diinput pada aplikasi SIMAK BMN;
3. Terkait hal tersebut kami sampaikan format isian Verifikasi dan Validasi sebagai Nota Kesepakatan yang wajib diisi oleh satuan kerja yang melaksanakan **Revaluasi BMN pada tahu 2017**;
4. Kepada Satuan Kerja dibawah Koordinator Wilayah Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk dapat mengirimkan format isian Verifikasi dan Validasi Revaluasi BMN dalam bentuk softcopy (file Excel) melalui email [span400358@gmail.com](mailto:span400358@gmail.com), data tersebut diterima paling **tanggal 5 Februari 2018**;

Demikian kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS  
PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA,

  
A. ABDUL KHAMID, S.H., M.H. H  
NIP. 19590610 199203 1 002

**Tembusan :**

1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI;
3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;